

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mampu mempersiapkan diri memasuki era pemerintahan yang kompetitif dan berdaya saing global yang diikuti dengan penumbuhan nilai-nilai demokratis ditingkat lokal agar desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan pada koridor yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mendorong pemberdayaan masyarakat. Kendala utama dalam pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi tersebut adalah terbatasnya kualitas sumber daya manusia aparatur.

Terbatasnya kualitas sumber daya manusia aparatur di Pusat maupun Daerah jelas merupakan faktor dominan dalam hal ketidakmampuan memberdayakan kapasitasnya masing-masing. Aparatur di tingkat Pusat belum sepenuhnya memahami cakupan kebijakan Otonomi Daerah dan implikasinya terhadap mekanisme kerja Pemerintah Pusat. Sementara Daerah sendiri belum mempunyai jasa layanan (*service provider*) yang memadai untuk mendukung percepatan desentralisasi. Demikian juga dengan kesiapan stakeholders untuk ikut berpartisipasi secara profesional dalam penyelenggaraan pembangunan, masih

mengisyaratkan sejumlah keterbatasan terutama yang berhubungan dengan tingkat kecakapan/ keahlian dan penguasaan teknologi modern.

Dalam menyongsong era globalisasi, Pemerintah menitik beratkan kebijaksanaan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan sebagai strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang bertujuan agar semua kebijaksanaan pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi masing – masing daerah.

Secara umum harus diakui bahwa citra, kedudukan dan peran aparatur pemerintah di era reformasi ini, nampaknya banyak menjadi sorotan. Hal ini ditandai dengan merebaknya pembicaraan tentang isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diforum – forum diskusi maupun pembahasan media massa, sehingga menimbulkan opini publik seolah – olah sulit diharapkan dari aparatur pemerintah menjadi motor penggerak kerja dalam memasuki era globalisasi.

Oleh karena itu pembangunan aparatur pemerintah diarahkan melalui peningkatan kualitas, produktifitas, efisiensi dan efektifitas dari seluruh tatanan administrasi pemerintahan termasuk peningkatan dari kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatur. Kesemuanya ini ditujukan untuk mewujudkan aparatur yang semakin mampu untuk melaksanakan seluruh tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan khususnya untuk memberikan pelayanan, pengayoman dan penumbuhan prakarsa dan peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pada hakekatnya tugas dari aparatur pemerintah adalah melayani kepentingan umum, sesuai dengan bidang tugas yang diemban yang sejalan